**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PASAL 137 JUNCTO PASAL 303
UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN
RESOR PELALAWAN**

Oleh : AFRIZAL

Pembimbing I : Dr. Erdianto, SH.,M.Hum

PembimbingII : Ledy Diana, SH. MH

Alamat: Jln. Bengkulu, Harapan Raya Kec. Bukit Raya

Email: Afrizal509@gmail.com–tlpn 085355503556

ABSTRACT

Traffic and road transport is key to the growth of a community. Community is dependent on land transportation and land transportation is closely related to traffic and road transport. With the increase in demand for transport resulting in violation of traffic on the highway is likely to cause an accident, there is a discrepancy tertiban road users and traffic congestion is felt increasing. Traffic violation is a situation where a discrepancy between the rules and implementation. The purpose of this study to determine enforcement of Article 137 and Article 303 of Law Number 22 Year 2009 regarding Traffic and Road Transportation, To know the obstacles encountered in enforcement of Article 137 and Article 303 of Law No. 22 of 2009 on Road Traffic and Road Transport and To know the efforts in overcoming obstacles to the enforcement of Article 137 and Article 303 based on Law Number 22 Year 2009 regarding Traffic and Road Transportation. Results of this research is the enforcement of the law against Article 137 in conjunction with Article 303 of Law Number 22 Year 2009 regarding Traffic and Road Transportation in the jurisdiction of Police Palalawan Palalawan implemented by the Police and the Civil Servant Investigators Pelalawan District Department of Transportation is to carry out law enforcement by way of giving out warnings or messages on roadside Area pairs and perform routine outreach to the community and employers who use pickups as mass transit.

Key words: Law enforcement - pickups

A. Pendahuluan

Negara Indonesia adalah negara berkembang, sebagai negara berkembang, Indonesia banyak melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi dalam pembangunannya. Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila, transportasi memiliki posisi yang penting dan strategis dalam pembangunan bangsa. Selain itu transportasi juga berperan sebagai penunjang, pendorong, dan penggerak bagi pertumbuhan daerah yang berpotensi namun belum berkembang, dalam upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan serta hasil-hasilnya.¹

Pembangunan dan perkembangan ilmu dan teknologi yang sangat pesat, mengakibatkan manusia dapat hidup lebih tentram. Akan tetapi di sisi lain terdapat pengaruh tertentu yang mengakibatkan terjadinya gangguan terhadap ketentraman kehidupan manusia. Kenyataan menunjukkan betapa banyaknya kecelakaan lalu lintas terjadi setiap hari yang mengakibatkan matinya manusia, cideranya manusia dan kerugian secara material. Penyebabnya berkisar pada faktor-faktor seperti pengemudi maupun pemakai jalan yang lainnya, konstruksi jalan yang kurang

baik, kendaraan yang tidak memenuhi syarat, rambu-rambu lalu lintas yang tidak jelas, dan lain sebagainya. Jalan raya misalnya, merupakan suatu sarana bagi manusia untuk mengadakan hubungan antar tempat, dengan mempergunakan berbagai jenis kendaraan baik yang bermotor maupun tidak. Jalan raya mempunyai peranan penting dalam bidang ekonomi, politik, sosial-budaya, pertahanan, keamanan dan hukum, serta dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.²

Lalu lintas dan angkutan jalan adalah kunci pertumbuhan sebuah komunitas. Masyarakat sangat tergantung pada sarana transportasi darat dan transportasi darat berkaitan erat dengan lalu lintas dan angkutan jalan.³

Pelanggaran hukum terhadap ketertiban dalam berlalu lintas sebenarnya merupakan suatu penghambat dalam mewujudkan keselamatan dan kelancaran dalam berlalu lintas, demikian pelanggaran berlalu lintas menjadi hal yang wajar dalam masyarakat dikarenakan beberapa hal seperti tidak mengetahui tentang aturan berlalu lintas serta kepribadian

¹C.S.T.Kansil dan Christine S.T.Kansil, *Disiplin Berlalu Lintas di Jalan Raya*, Rineka Cipta, Jakarta: 1995, hlm. 3.

²Soerjono Soekanto, *Polisi dan Lalu Lintas (Analisis Menurut Sosiologi Hukum)*, Mandar Maju, Bandung: 1990, hlm. 42-43.

³Marye Agung Kusmadi, *Selamat Berkendara Di Jalan Raya*, Raih Asa Sukses, Jakarta: 2010, hlm. 12.

yang tidak taat terhadap aturan yang berlaku.

Ketentuan pidana terhadap pelanggaran mobil bak terbuka ini telah diatur dalam Pasal 303 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang berbunyi: “Setiap orang yang mengemudikan mobil barang untuk mengangkut orang kecuali dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam dalam pasal 137 ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)”.

Pasal 137 ayat (4) menyebutkan bahwa mobil barang dilarang digunakan untuk angkutan orang. Pada permasalahan ini pengecualian yang dimaksud pada Pasal 137 ayat (4) pada huruf a, huruf b, dan huruf c. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan berbunyi:

1. Huruf a, rasio kendaraan bermotor untuk angkutan orang, kondisi geografis, dan prasarana jalan di provinsi/kabupaten/kota belum memadai.
2. Huruf b, untuk pengerahan atau pelatihan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Republik Indonesia atau.
3. Huruf c, kepentingan lain berdasarkan kepentingan lain berdasarkan pertimbangan Kepolisian Negara Republik

Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah.

Pada dasarnya permasalahan yang terjadi di Kabupaten Pelalawan termasuk dalam pengecualian yang dimaksud pada Pasal 137 ayat (4) huruf a. Namun dalam penegakannya Kepolisian Resor Pelalawan tetap melakukan penindakan terhadap pelanggaran mobil bak terbuka, apabila kepolisian sendiri melihat secara kasap mata maka tetap akan dilakukan pemeriksaan untuk melaksanakan penindakan terhadap pelaku pelanggaran⁴.

Namun pengawasan terhadap pelanggaran mobil bak terbuka sebagai angkutan massal seharusnya telah maksimal karena terdapat pos polisi lalu lintas pada jalan lintas timur pada Kecamatan Pangkalan Kuras, Kecamatan Ukui dan Kecamatan Seikijang. Namun timbul suatu permasalahan mobil bak terbuka yang mengangkut orang untuk antar jemput kerja tidak melintas di depan pos polisi yang berada di kecamatan Pangkalan Kuras sehingga sulitnya aparat penegak hukum yang akan melakukan penegakan hukum. Hal tersebut menjadi salah satu hambatan dalam penegakan hukum pelanggaran mobil bak terbuka sebagai angkutan massal di wilayah hukum kabupaten

⁴Wawancara dengan Bapak Ajun Komisararis Polisi Afrizal, SIK Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Pelalawan, Hari Kamis Tanggal 5 Februari 2015, Bertempat di Kepolisian Resor Pelalawan.

pelalawan, meskipun diketahui bahwa penggunaan mobil bak terbuka atau mobil yang seharusnya di peruntukkan sebagai muatan barang sangat membahayakan apabila digunakan sebagai angkutan orang dalam jumlah banyak seperti yang telah terjadi pada daerah diluar Kabupaten pelalawan yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan yang menimbulkan jatuhnya korban jiwa.

Dengan demikian, untuk dapat terlaksananya penegakan hukum para petugas yang berusaha mengamankan dan menegakan hukum. Dalam arti para petugasnya. Hukum dibayangkan dalam wujud petugas yang berseragam dan bisa bertindak terhadap orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan yang membahayakan warga masyarakat.⁵ Terhadap pelanggaran mobil bak terbuka sebagai angkutan massal maka peran dari aparat pemerintah terutama di bidang penegakan hukum untuk dapat melakukan penindakan terhadap pelanggaran mobil bak terbuka, yaitu peranan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia dan dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai mana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan di perjelas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun

2014 Tentang Angkutan jalan Yang selanjutnya ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan. Dan penindakan terhadap pelanggaran mobil bak terbuka yang di pergunakan sebagai angkutan massal dapat ditingkatkan demi tercapainya keselamatan bagi pengguna jalan.

Dari berbagai aspek dalam uraian latar belakang masalah diatas maka penulis akan memfokuskan pembahasan masalah dengan judul: ***“Penegakan Hukum Terhadap Pasal 137 Juncto Pasal 303 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Pelalawan”***.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap Pasal 137 juncto Pasal 303 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di wilayah hukum Kepolisian Resor Pelalawan?
2. Apa sajakah kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap Pasal 137 juncto Pasal 303 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di wilayah hukum Kepolisian Resor Pelalawan?
3. Bagaimanakah upaya untuk mengatasi hambatan dalam penegakan hukum terhadap Pasal 137 juncto Pasal 303

⁵Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2010, hlm. 34.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di wilayah hukum Kepolisian Resor Pelalawan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap Pasal 137 juncto Pasal 303 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- b. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap Pasal 137 juncto Pasal 303 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- c. Untuk mengetahui upaya dalam mengatasi kendala penegakan hukum terhadap Pasal 137 juncto Pasal 303 berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk menambah wawasan bagi penulis terhadap Pasal 137 juncto Pasal 303 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, hambatan dalam penegakan hukumnya, beserta upaya dalam mengatasi kendala penegakan hukum

terhadap Pasal 137 juncto Pasal 303 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di wilayah hukum Kepolisian Resor Pelalawan.

- b. Untuk menambah referensi perpustakaan dan sebagai sumbangan penulis terhadap almamater Universitas Riau Khususnya Fakultas Hukum serta bagi seluruh pembaca.
- c. Sebagai referensi bagi Kepolisian Resor Pelalawan dan penyidik pegawai Negeri Sipil dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran mobil bak terbuka sebagai angkutan massal.

D. Kerangka Teori

1. Teori Tindak Pidana

Dari istilah saja, dapat ditemui beberapa istilah yang pengertiannya sama. Istilah itu misalnya tindak pidana, delik, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan pidana, (*strqfbaarfeit*).⁶ Pengertian tindak pidana menurut Moeljatno yang dikutip oleh Erdianto Efendi menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa melanggar tersebut. Perbuatan

⁶Erdianto Effendi, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru: 2010, hlm. 53.

itu harus pula dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.

Dari istilah saja, dapat ditemui beberapa istilah yang pengertiannya sama. Istilah itu misalnya tindak pidana, delik, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan pidana, (*strqfbaarfeit*).⁷ Pengertian tindak pidana menurut Moeljatno yang dikutip oleh Erdianto Efendi menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa melanggar tersebut. Perbuatan itu harus pula dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum diartikan sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum, yaitu pikiran-pikiran dari badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dan ditetapkan dalam peraturan-peraturan hukum yang kemudian menjadi suatu kenyataan.⁸

Penegakan hukum menurut Mertokusumo yang dikutip oleh Satjipto Rahardjo mempunyai makna yaitu bagaimana hukum dilaksanakan, sehingga dalam

penegakan hukum tersebut harus di perhatikan unsur-unsur kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Penegakan hukum adalah keseluruhan kegiatan dari pelaksana penegak hukum dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketentraman, kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁹

E. Kerangka Konseptual

1. Hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dilakukan oleh Penguasa atau Pemerintah.¹⁰
2. Penegakan hukum adalah tindakan untuk mencapai keadilan dan kebenaran.¹¹
3. Pelanggaran adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang oleh Undang-Undang pidana ditentukan lebih ringan pidananya dari pada kejahatan.¹²
4. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan,

⁷Erdianto Effendi, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Alaf Riau, Pekanbaru: 2010, hlm. 53.

⁸Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung: 1993, hlm 15.

⁹Barda Nawawi Arief. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2005, hlm. 8.

¹⁰ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Pustaka Phonix, Jakarta: 2007, 369.

¹¹ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta: 2008, hlm. 76.

¹²*Ibid.* hlm. 95.

- Pengemudi, serta pengelolaanya.¹³
5. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.¹⁴
 6. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ketempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.¹⁵
 7. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan di atas rel.¹⁶
 8. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan bermotor yang di jalan yang telah memiliki surat izin mengemudi.¹⁷
 9. Penumpang adalah orang yang berada di kendaraan selain pengemudi dan awak kendaraan.¹⁸
 10. Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.¹⁹
 11. Mobil Barang adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.²⁰
 12. Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.²¹
 13. Petugas Pemeriksa adalah Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.²²
 14. Massal adalah mengikut sertakan atau melibatkan orang banyak.²³

¹³Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

¹⁴Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

¹⁵Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

¹⁶Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

¹⁷Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

¹⁸Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

¹⁹Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan

²⁰Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan

²¹Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

²²Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Dijalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

²³*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta: 2003, hlm. 612.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini digolongkan dalam jenis penelitian empiris atau sosiologis atas hukum akan menghasilkan teori-teori tentang eksistensi dan fungsi hukum dalam masyarakat, berikut perubahan-perubahan yang terjadi dalam proses-proses perubahan sosial.²⁴ Sifat dari penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu metode yang dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti.²⁵

2. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah hukum Kepolisian Resor Pelalawan, di karenakan di wilayah hukum Kepolisian Resor Pelalawan masih sering terjadi pelanggaran mobil bak terbuka yang digunakan sebagai angkutan orang.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer dikumpulkan oleh peneliti sendiri yang langsung dicatat oleh peneliti dari sumber data yang diteliti

²⁴Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2011, hlm. 78.

²⁵<http://nurfatihmahdaulay18.blogspot.com/> di akses, tanggal, 19 Januari 2015.

sesuai dengan permasalahan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer tersebut. Data sekunder juga dapat berupa buku, hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian.

1. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan penelitian yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan di perjelas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan jalan yang selanjutnya ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan.

2. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan penelitian yang bersumber dari penelitian para sarjana, buku, jurnal yang berkaitan dengan

pokok pembahasan yang akan di teliti.

3. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan-bahan penelitian yang diperoleh melalui kamus, ensiklopedia dan internet yang berfungsi sebagai pendukung terhadap data primer maupun data sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Kuisisioner

Kuisisioner adalah metode pengumpulan data dengan cara membuat daftar-daftar pertanyaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang akan di teliti.

b. Wawancara

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara terstruktur yang berarti bahwa dalam melakukan wawancara penulis telah mempersiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang hendak disampaikan kepada responden.

c. Kajian Kepustakaan

Kajian kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengkaji, menelaah dan menganalisis literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang diteliti.

5. Analisis Data

Dalam penelitian hukum ini analisis data yang digunakan

adalah analisis kualitatif yaitu data tidak dianalisis dengan menggunakan statistik atau matematika ataupun yang sejenisnya, namun cukup dengan menguraikan secara deskriptif dari data yang telah diperoleh.

Selanjutnya penulis menarik kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus, yang mana dalam mendapatkan suatu kesimpulan dimulai dengan melihat faktor-faktor nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana kedua fakta tersebut dijembatani oleh teori-teori.²⁶

G. Penegakan Hukum Terhadap Pasal 137 Juncto Pasal 303 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Pelalawan

Penegakan hukum terhadap pelanggaran mobil bak terbuka sebagai angkutan massal telah diatur dalam Pasal 137 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi :

Mobil barang dilarang digunakan untuk angkutan orang, kecuali: rasio kendaraan bermotor untuk angkutan orang, kondisi geografis, dan prasarana jalan di

²⁶Aslim Rasyad, *Metode Ilmiah, Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru: 2005, hlm. 20.

provinsi/kabupaten/kota belum memadai, untuk pengerahan atau pelatihan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Republik Indonesia atau, kepentingan lain berdasarkan kepentingan lain berdasarkan pertimbangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah.

Sedangkan terhadap sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku pelanggaran Pasal 137 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat dikenakan dengan Pasal 303 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berbunyi:

“Setiap orang yang mengemudikan mobil barang untuk mengangkut orang kecuali dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam dalam pasal 137 ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)”.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas dan khususnya pada pelanggaran mobil bak terbuka dapat dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di dalam penegakan hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan maka Penyidik pegawai Negeri Sipil wajib berkordinasi kepada Kepolisian Republik Indonesia pada saat melakukan operasi penindakan di jalan serta

didampingi oleh Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

H. Kendala Yang Dihadapi Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pasal 137 Juncto Pasal 303 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Pelalawan

Dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap mobil bak terbuka sebagai angkutan massal terdapat kendala maupun hambatan yang di alami oleh Kepolisian Resor Pelalawan dan Penyidik pegawai Negeri Sipil Dinas perhubungan Kabupaten pelalawan. Adapun kendala tersebut berupa:

1. Faktor Penegak Hukum

Faktor ini merupakan faktor yang penting dalam proses penegakan hukum sehingga apabila terjadi ketidak sesuaian maka hasil dari penegakan hukum terhadap pelanggaran mobil bak terbuka sebagai angkutan massal tidak akan sesuai dengan yang diharapkan, hambatan yang sering dihadapi oleh Kepolisian Resor Pelalawan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Perhubungan Kabupaten Pelalawan adalah sebagai berikut:

- a) Adanya tindakan diskriminatif oleh oknum aparat Kepolisian Lalu Lintas Resor Pelalawan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas

Perhubungan Kabupaten Pelalawan.²⁷

2. Faktor Sarana dan Fasilitas

Sarana dan fasilitas merupakan hal yang penting dalam proses penegakan hukum. Yang meliputi tentang manusia yang berpendidikan dan trampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Tanpa hal ini maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.²⁸

Permasalahan fasilitas yang kurang memadai di kabupaten pelalawan terletak pada kurangnya jumlah tersedianya pos dinas perhubungan di sepanjang jalan lintas timur.²⁹ Hal ini dapat mempengaruhi terhadap penegakan hukum pelanggaran mobil bak terbuka sebagai angkutan massal di kabupaten pelalawan. Dengan tidak adanya pos

²⁷Wawancara dengan Bapak Brigadir Polisi Teguh Satria, Baur Tilang Kepolisian Resor Pelalawan, Hari Kamis Tanggal 5 Februari 2015, Bertempat di Kepolisian Resor Pelalawan.

²⁸Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan hukum*, *Op.cit*, hlm. 37.

²⁹Wawancara dengan Bapak Lukman,S.sos, Kapala Sesi Operasi Lalu Lintas, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Perhubungan Pelalawan, hari Selasa, Tanggal 14 April 2015, Bertempat di Dinas Perhubungan Pelalawan.

penjagaan menyulitkan petugas untuk melakukan pemeriksaan secara maksimal. Seharusnya pemerintah daerah memerhatikan permasalahan ini dan dapat membangun pos penjagaan agar penegakan hukum yang dilakukan petugas sesuai dengan yang diharapkan dan menurunnya tingkat pelanggaran mobil bak terbuka sebagai angkutan dikabupaten pelalawan.

3. Faktor Kesadaran Hukum Oleh Masyarakat
Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.³⁰ Hukum diciptakan sebagai alat pengontrol prilaku manusia, meskipun dalam pelaksanaannya hukum harus bersifat memaksa namun banyak masyarakat tidak menegerti akan fungsi dari hukum itu sendiri.

I. Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pasal 137 Juncto Pasal 303 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di

³⁰Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan hukum*, *Op.cit*, hlm. 45.

Wilayah Hukum Kepolisian Resor Pelalawan

Dalam melaksanakan penegakan hukum, aparat sering sekali menemukan hambatan-hambatan, baik itu dari dalam *internal* aparat penegak hukum ataupun dari *eksternal* aparat penegak hukum. Untuk mengatasi hambatan dalam penegakan hukum terhadap mobil bak terbuka sebagai angkutan massal. Maka aparat penegak hukum baik dari Kepolisian Resor Pelalawan maupun Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Perhubungan Kabupaten Pelalawan melakukan tindakan sebagai berikut:

1. Faktor Penegak Hukum

- a) Upaya untuk mengatasi adanya tindakan diskriminatif oleh oknum aparat Kepolisian Resor Pelalawan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Perhubungan Kabupaten Pelalawan

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi terhadap tindakan diskriminatif yang dilakukan oleh oknum Kepolisian Resor Pelalawan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil terhadap pelaku pelanggaran mobil bak terbuka sebagai angkutan massal adalah dengan berbagai cara yaitu dengan mengadakan seminar-seminar pelatihan yang memberikan

pengetahuan terhadap aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya. Dan tidak lupa memberikan reward kepada petugas yang berprestasi dalam melaksanakan tugasnya. Sehingga dengan upaya-upaya ini diharapkan aparat dapat semakin termotivasi untuk melaksanakan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.³¹

2. Faktor sarana dan Fasilitas

Upaya untuk mengatasi kurangnya fasilitas pos jaga dengan baik dan layak. Yang mengakibatkan kurangnya maksimalnya kinerja dari aparat penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum terhadap mobil bak terbuka sebagai angkutan massal. Atas permasalahan tersebut Kepolisian Resor Pelalawan yang dalam hal ini Kepala Satuan Lalu Lintas telah mengajukan permohonan kepada pimpinan untuk membenahi fasilitas pos jaga yang telah ada dan menambah jumlah pos jaga untuk memaksimalkan dalam

³¹Wawancara dengan Bapak Ajun Komisaris Polisi Afrizal, SIK Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Pelalawan, Hari Kamis Tanggal 5 Februari 2015, Bertempat di Kepolisian Resor Pelalawan.

penegakan hukum yang berkaitan dengan lalu lintas.³²

3. Faktor Kesadaran Hukum oleh Masyarakat

Dalam mengupayakan kesadaran masyarakat terhadap hukum, para penegak hukum sebenarnya telah melakukan sosialisasi dengan mengundang perusahaan dan masyarakat untuk diberikan pengarahan atau pengetahuan tentang larangan menggunakan mobil bak terbuka sebagai angkutan massal. namun juga memberikan solusi kepada perusahaan apabila tidak dapat menyediakan kendaraan penumpang dapat menggunakan mobil bak terbuka tersebut namun dengan kriteria yang telah ditentukan pada pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan. yang pada intinya memuat tentang persyaratan minimum kendaraan barang sebagai angkutan orang dalam jumlah massal harus memiliki kriteria sebagai berikut:

- 1) Tersedianya tangga untuk naik turun;
- 2) Tersedianya tempat duduk dan/atau pegangan tangan untuk semua penumpang;

3) Terlindung dari sinar matahari dan/atau hujan; dan

4) Tersedianya sirkulasi udara

J. Kesimpulan

Penegakan hukum terhadap Pasal 137 juncto Pasal 303 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di wilayah hukum Kepolisian Resor Pelalawan dilaksanakan oleh Kepolisian Resor Pelalawan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dinas Perhubungan Kabupaten Pelalawan yaitu dengan melaksanakan penegakan hukum dengan cara memberikan peringatan atau pesan-pesan yang di pasang di sekitaran pinggir jalan serta rutin melakukan penyuluhan kepada masyarakat maupun pengusaha yang menggunakan mobil bak terbuka sebagai angkutan massal. Atau memberikan surat tilang kepada pelaku pelanggaran. meskipun aparat telah melakukan perannya namun dalam melaksanakan penegakan hukum tetap saja terdapat kendala yang menghambat proses penegakan hukum.

Kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap Pasal 137 juncto Pasal 303 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di wilayah hukum Kepolisian Resor Pelalawan adalah kendala yang meliputi tindakan diskriminatif oleh oknum petugas saat melaksanakan kewenangannya sehingga menimbulkan kecemburuan sosial

³²Wawancara dengan Bapak Ajun Komisaris Polisi Afrizal, SIK Kepala Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Pelalawan, Hari Kamis Tanggal 5 Februari 2015, Bertempat di Kepolisian Resor Pelalawan.

pada masyarakat. Serta tidak maksimalnya penjatuhan sanksi yang diberikan kepada pelaku pelanggaran Dan lebih diperburuk dengan koordinasi antara Kepolisian Resor Pelalawan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang kurang baik dalam melaksanakan peranannya.

Upaya untuk mengatasi hambatan dalam penegakan hukum terhadap Pasal 137 juncto Pasal 303 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di wilayah hukum Kepolisian Resor Pelalawan dengan cara, mengadakan seminar-seminar pelatihan yang memeberikan pengetahuan terhadap aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya. Serta dari Pihak Kepolisian Resor Pelalawan adalah membentuk forum lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten pelalawan Yang bertujuan untuk menjalin koordinasi yang baik.

K. Saran

Penegakan hukum terhadap pelanggaran mobil bak terbuka sebagai angkutan massal agar dapat dimaksimalkan mengingat akibat yang ditimbulkan apabila menggunakan mobil bak terbuka sebagai angkutan massal dapat membahayakan jiwa dari penumpang maupun pengemudi.

Dalam mengatasi hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum hendaknya aparat penegak hukum yang dalam hal ini Kepolisain Resor Pelalawan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil lebih memaksimalkan terhadap koordinasi antar instansi.

Agar tercipta hubungan yang baik bukan hanya dari unsur pimpinan saja melainkan anggota dari masing-masing instansi penegak hukum.

Upaya untuk mengatasi hambatan seharusnya pemerintah ikut serta dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran mobil bak terbuka sebagai angkutan massal yaitu dengan memperhatikan sarana dan prasarana yang akan mempengaruhi dalam proses penegakan hukum. Serta menyediakan alat transportasi yang layak dan nyaman kepada masyarakat agar masyarakat dapat menjalankan kegiatan ekonominya dengan rasa aman dan nyaman pula. Dengan hal ini diharapkan dapat meningkatkan ketertiban berlalu lintas dan meminimalisir kecelakaan yang dapat merenggut nyawa.